

KATA PENGANTAR

BIRO PEREKONOMIAN adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BIRO PEREKONOMIAN disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi, kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan BIRO PEREKONOMIAN yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 30 Desember 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FRANS ZENO, S.STP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Laporan Operasional

III Neraca

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.
 - 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.2. Laporan Operasional
 - 3.1.3. Neraca
 - 3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 30 Desember 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FRANS ZENO, S.STP

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. :

Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dan Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.950.796.330,00 atau mencapai 97,85% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.993.558.197,00

II. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Desember 2022 terdiri dari Pendapatan-LO sebesar 0,00, beban sebesar 1.951.096.564,32 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar -1.951.096.564,32.

III. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Desember 2022

Nilai Aset per 30 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 111.174.586,47 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 1.057.613,47 Aset Tetap sebesar Rp. 102.095.977,00 Aset Lainnya sebesar Rp. 8.020.996,00.

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 111.174.586,47, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 111.174.586,47

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp. -8.415.022.291,21 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -2.018.309.708,32 kemudian ditambah/dikurangi dengan Lain-lain sebesar Rp. 95.197.185,00 sehingga Ekuitas Akhir entitas BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Kalimantan Barat per 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp. -10.338.134.814,53.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah mencakup komponen-komponen pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pada intinya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama periode tertentu. Laporan Keuangan SKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan mengenai alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja.

Laporan Keuangan BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
 14. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 208).

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Setiap Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam realisasinya mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan-pengungkapan dan informasi tambahan lainnya yang diharapkan mempermudah para pengguna untuk memahami penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Kalimantan Barat.

Karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022, terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan.

- 3.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos-pos pelaporan keuangan.
 - 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.2. Laporan Operasional
 - 3.1.3. Neraca
 - 3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH/ (BERKURANG) (Rp.)	%
4.01.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4.01.0.00.0.00.01.0004	BIRO PEREKONOMIAN				
	BELANJA BIRO PEREKONOMIAN	1.993.558.197,00	1.950.796.330,00	(42.761.867,00)	97.85
	BELANJA OPERASI	1.993.558.197,00	1.950.796.330,00	(42.761.867,00)	97.85
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	100
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	429.937.090,00	425.591.436,00	(4.345.654,00)	98.98
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN	1.563.621.107,00	1.525.204.894,00	(38.416.213,00)	97.54

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Reff	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Reff	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
------	--------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	---	------------------------

5	BELANJA DAERAH	1.993.558.197,00	1.950.796.330,00	(42.761.867,00)	97,85	1.136.104.577,00
----------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------	-------------------------

Belanja pada BIRO PEREKONOMIAN Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp.1.993.558.197,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.1.950.796.330,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp. 1.136.104.577,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 814.691.753,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

5.1 BELANJA OPERASI	1.993.558.197,00	1.950.796.330,00	(42.761.867,00)	97,85	1.136.104.577,00
---------------------	------------------	------------------	-----------------	-------	------------------

5.2 BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------

5.1	BELANJA OPERASI	1.993.558.197,00	1.950.796.330,00	(42.761.867,00)	97,85	1.136.104.577,00
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------	-------------------------

5.1.01 Belanja Pegawai	930.000,00	0,00	(930.000,00)	0,00	0,00
------------------------	------------	------	--------------	------	------

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	1.992.628.197,00	1.950.796.330,00	(41.831.867,00)	97,90	1.136.104.577,00
--------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------	------------------

5.1.01	Belanja Pegawai	930.000,00	0,00	(930.000,00)	0,00	0,00
---------------	------------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Belanja Pegawai pada BIRO PEREKONOMIAN Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 930.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 0,00. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	930.000,00	0,00	(930.000,00)	0,00	0,00
---	------------	------	--------------	------	------

Objektif Lainnya
ASN

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa **1.992.628.197,00** **1.950.796.330,00** **(41.831.867,00)** **97,90** **1.136.104.577,00**

Belanja Barang dan Jasa pada BIRO PEREKONOMIAN Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 1.992.628.197,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.950.796.330,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.1.136.104.577,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 814.691.753,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

5.1.02.01 Belanja Barang 381.297.107,00 376.086.587,00 (5.210.520,00) 98,63 146.221.781,00

5.1.02.02 Belanja Jasa 1.057.869.520,00 1.034.883.896,00 (22.985.624,00) 97,83 843.814.789,00

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.218.200,00 70.116.900,00 (101.300,00) 99,86 47.541.500,00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 483.243.370,00 469.708.947,00 (13.534.423,00) 97,20 98.526.507,00

5.2 BELANJA MODAL **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BIRO PEREKONOMIAN Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 0,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.3 Penjelasan atas Neraca

Komposisi dan Rasio perbandingan Neraca per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Reff	Penjelasan Neraca	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	ASET	111.174.586,47	83.490.779,79
	Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari :		
	1.1 Aset Lancar	1.057.613,47	1.357.847,79
	1.3 Aset Tetap	102.095.977,00	74.111.936,00
	1.4 Aset Lainnya	8.020.996,00	8.020.996,00
	Jumlah Aset	<u>111.174.586,47</u>	<u>83.490.779,79</u>
1.1	ASET LANCAR	1.057.613,47	1.357.847,79
	Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari :		
	1.1.6 Beban Dibayar Dimuka	1.057.613,47	1.357.847,79
	Jumlah Aset Lancar	<u>1.057.613,47</u>	<u>1.357.847,79</u>
1.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan ke Kas Daerah.		
	1. Pendapatan Yang Belum Disetor		0,00
	2. Uang Titipan		0,00
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Daerah termasuk di dalamnya adalah Kas yang masih terdapat pada Rekening Koran, kas yang berasal dari PPN dan PPH yang dipungut tetapi belum disetorkan.

1. Sisa Kas UP/GU/TU		0,00
2. Pajak di SKPD yang Belum Disetor		0,00
3. Uang Titipan		0,00
4. Jasa Giro		0,00
5. Kas Lainnya		0,00

1.1.3 Piutang Pendapatan 0,00 0,00

Piutang Pendapatan terdiri dari piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah.

1 Piutang Pajak Daerah 0,00 0,00

Piutang pajak kendaraan bermotor disajikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

2 Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00

Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Pajak, denda Retribusi dan Denda Pengembalian.

1.1.4	Piutang Lainnya	0,00	0,00
--------------	------------------------	-------------	-------------

Piutang Lainnya adalah Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran terdiri dari Pembayaran Angsuran Rumah Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan Angsuran Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Barat.

1	Angsuran Rumah Dinas	0,00	0,00
2	Angsuran Kendaraan Dinas	0,00	0,00
	Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00

1.1.5	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
--------------	---------------------------	-------------	-------------

Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari penyisihan piutang pajak dan penyisihan piutang retribusi.

1	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
---	--------------------------	------	------

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

- a. Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

2	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
---	------------------------------	------	------

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
---	---	------	------

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Lain-lain PAD yang Sah, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

1.1.6 Beban Dibayar Dimuka 1.057.613,47 1.357.847,79

Beban dibayar dimuka terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka (asuransi dibayar dimuka dan Sewa gedung)

1 Asuransi dibayar dimuka	1.057.613,47	1.357.847,79
2 Sewa gedung	0,00	0,00
Jumlah Beban dibayar dimuka	1.057.613,47	1.357.847,79

1.1.7 Persediaan 0,00 0,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi barang tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual.

1 Persediaan Barang Pakai Habis	0,00	0,00
2 Persediaan Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
3 Persediaan Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	0,00	0,00

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 0,00 0,00

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

1.3 Aset Tetap 102.095.977,00 74.111.936,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian dan perbandingan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari :

1.3.01 Tanah	0,00	0,00
--------------	------	------

	1.3.02 Peralatan dan Mesin	1.090.938.354,00	995.741.169,00
	1.3.03 Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	1.3.04 Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
	1.3.05 Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	1.3.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	1.3.07 Akumulasi Penyusutan	(988.842.377,00)	(921.629.233,00)
	Jumlah Aset Tetap	102.095.977,00	74.111.936,00
1.3.01	Tanah	0,00	0,00
	1 Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2021	0,00	
	2 Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Hibah		
	2.3 Beban		
	2.4 Mutasi Antar SKPD		
	2.5 Reklas		
	2.6 Revaluasi		
	2.7 Koreksi		
	2.8 Mutasi Nomenklatur		
	3 Mutasi Berkurang	0,00	
	3.1 Hibah		
	3.2 Penghapusan		
	3.3 Mutasi Antar SKPD		
	3.4 Reklas		
	3.5 Revaluasi		
	3.6 Koreksi		
	3.7 Rusak Berat		
	3.8 Beban		
	3.9 Mutasi Nomenklatur		
	5 Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2022	0,00	
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.090.938.354,00	995.741.169,00

	3.6 Koreksi		
	3.7 Rusak Berat		
	3.8 Beban		
	3.9 Ekstracomptable		
	3.1.0 Mutasi Nomenklatur		
	5 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022	1.090.938.354,00	
1.3.03	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	1 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021	0,00	
	2 Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Hibah		
	2.3 Beban		
	2.4 Mutasi Antar SKPD		
	2.5 Reklas		
	2.6 Revaluasi		
	2.7 Koreksi		
	2.8 Pengadaan dari Belanja Tidak Terduga		
	2.9 Mutasi Nomenklatur		
	3 Mutasi Berkurang	0,00	
	3.1 Hibah		
	3.2 Penghapusan		
	3.3 Mutasi Antar SKPD		
	3.4 Reklas		
	3.5 Revaluasi		
	3.6 Koreksi		
	3.7 Rusak Berat		
	3.8 Beban		
	3.9 Mutasi Nomenklatur		
	5 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022	0,00	

1.3.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
1	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021	0,00	
2	Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Hibah		
	2.3 Beban		
	2.4 Mutasi Antar SKPD		
	2.5 Reklas		
	2.6 Revaluasi		
	2.7 Koreksi		
	2.8 Mutasi Nomenklatur		
3	Mutasi Berkurang	0,00	
	3.1 Hibah		
	3.2 Penghapusan		
	3.3 Mutasi Antar SKPD		
	3.4 Reklas		
	3.5 Revaluasi		
	3.6 Koreksi		
	3.7 Rusak Berat		
	3.8 Beban		
	3.9 Mutasi Nomenklatur		
5	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022	0,00	
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1	Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021	0,00	
2	Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Hibah		
	2.3 Beban		
	2.4 Mutasi Antar SKPD		
	2.5 Reklas		

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

1 Ekuitas Awal	(8.415.022.291,21)
2 Surplus/ Defisit - LO	(2.018.309.708,32)
2.1 Surplus/defisit kegiatan operasional	(1.951.096.564,32)
2.2 Surplus/defisit kegiatan Non operasional	0,00
2.3 Pos Luar Biasa	0,00

3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar :

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

3.1 Koreksi Nilai Persediaan **0,00**

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode

3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap **0,00**

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3.3 Lain - lain **95.197.185,00**

Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas

a. Penyisihan Piutang	0,00
b. Koreksi Penyusutan	0,00
c. Hibah Keluar	0,00
d. Mutasi Masuk Aset OPD	95.197.185,00
e. Mutasi Keluar Aset OPD	0,00
f. Penghapusan TPTGR	0,00
g. Perubahan Kode Rekening	0,00
h. Koreksi Tanah	0,00
i. Koreksi Utang Belanja	0,00
j. Reklass Antar Akun	0,00
k. Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
l. Penyertaan Modal	0,00
m. Persediaan APBN yang belum	0,00
n. Aset peralatan dan mesin reklas ke persediaan lain-lain	0,00

o. Koreksi Dana Transfer Pemerintah Pusat	0,00
p. Koreksi Gedung dan Bangunan	0,00
q. Koreksi Persediaan	0,00
r. Koreksi Kas	0,00
s. Extracomptable	0,00
t. Koreksi Peralatan Dan Mesin	0,00
u. Koreksi Jaringan Irigasi Jembatan	0,00
v. Koreksi Aset Tetap Lainnya	0,00
w. Koreksi Piutang	0,00
x. Koreksi Aset Lain Lain	0,00
y. Pelimpahan Masuk	0,00
z. Pelimpahan Keluar	0,00
4 Ekuitas Akhir	(10.338.134.814,53)

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 untuk Informasi Non Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1 Gambaran Umum

Biro Perokonomian mempunyai tugas kebijakan daerah dibidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk Melaksanakan Tugas Biro Perekonomian Mempunyai Fungsi :

a. Perumusan Program Kerja dibidang Perokonomian

b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam, BUMD dan BLUD sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan,

c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang perekonomian, sumber daya alam BUMD dan BLUD sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan,

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang peronomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai peraturan perundang-undangan

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan

BLUD sesuai ketentuan perundang-undangan.

f. Penelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perekonomian, sumber daya

alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain dibidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretariat Daerah dan Asisten Perekonomian dan

Pembangunan.

4.3 Struktur Organisasi

Pada Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dijelaskan bahwa susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Asisten Biro, Bagian dan Kelompok Jabatan Pungsional.

Dalam Pasal 110 *eraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Funsinya serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah dikemukakan diatas, dijelaskan bahwa secara struktural Biro Perekonomian berada dibawah kepemimpinan seorang Kepala Biro dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Struktur Organisasi Biro Perekonomian terdiri dari Kepala Biro, Bagian Kebijakan Perekonomian, Bagian Sumber Daya Alam, Bagian BUMD dan BLUD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Biro Perekonomian dipimpin oleh Pejabat Struktural Esselon II dan III Bagian di Biro Perekonomian tersebut masing-masing dipimpin oleh Pejabat Struktural Esselon III (Kepala Bagian) selain itu terdapat 9 (sembilan) Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Pejabat Struktural Esselon IV termasuk Sub Bagian Usaha Biro.

4.4 Visi dan Misi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018 - 2023 adalah " Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah " Misi untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut adalah :


1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance;
3. Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat;
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera;
5. Mewujudkan Masyarakat Tertib;
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan .

Terkait Visi dan Misi RPJMD 2018 - 2023 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur Prengkat Daerah yang merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam serta BUMD dan BLUD.

Berkenan dengan itu, maka Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4 " mewujudkan Masyarakat Sejahtera "

4.5 Extracomptable	Tahun 2022	Tahun 2021
a. Persediaan Lain-lain	0,00	0,00
b. Aset Tetap	1.575.000,00	1.575.000,00

Pontianak, 30 Desember 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FRANS ZENO, S.STP
NIP: 197903021998021001

BAB V. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 ini disusun sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan keuangan akhir tahun terdiri : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian laporan keuangan ini kami susun dengan harapan semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pihak yang terkait dan semoga dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022.

Pontianak, 30 Desember 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FRANS ZENO, S.STP

ANALISIS
PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEREKONOMIAN

a. ANALISIS VERTIKAL	
1) Analisis vertikal dalam LRA	
Uraian	Persamaan
Surplus/Defisit LRA tahun berjalan harus sama dengan total pendapatan dikurangi total belanja	Surplus/Defisit = Total Pendapatan - Total Belanja
RUMUS	
SURPLUS/DEFISIT LRA THN BERJALAN	(1.950.796.330,00)
TOTAL PENDAPATAN	0,00
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	1.950.796.330,00
Selisih	0,00
2) Analisis vertikal dalam Neraca	
Uraian	Persamaan
Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas	Aset = Kewajiban + Ekuitas
RUMUS	
ASET	111.174.586,47
KEWAJIBAN	0,00
EKUITAS	111.174.586,47
Selisih	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda ditambah dengan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara.	Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran
RUMUS	
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	0,00
SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR	0,00
UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN	0,00
Selisih	0,00
3) Analisis vertikal dalam Laporan Operasional(LO)	
Uraian	Persamaan
Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan(LO) dikurangi total Beban(LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional(LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa(LO)	Surplus/Defisit LO= Total Pendapatan(LO) - Total Beban(LO)+/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional(LO) +/- Pos Luar Biasa(LO)
RUMUS	
SURPLUS(DEFISIT) LO	(2.018.309.708,32)
TOTAL PENDAPATAN(LO)	0,00

TOTAL BEBAN(LO)	:	(2.018.309.708,32)
TOTAL SURPLUS(DEFISIT)KEGIATAN NON OPERASIONAL	:	0,00
TOTAL POS LUAR BIASA	:	0,00
Selisih	:	0,00

4) Analisis vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian		Persamaan
Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal ditambah(dikurangi) surplus/defisit LO ditambah(dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas		Ekuitas akhir = ekuitas awal(+/-) surplus/defisit LO(+/-) koreksi berdampak ke ekuitas
RUMUS		
Ekuitas Akhir	:	(10.338.134.814,53)
Ekuitas Awal	:	(8.415.022.291,21)
Surplus/defisit LO	:	(2.018.309.708,32)
Koreksi	:	95.197.185,00
Selisih	:	0,00

b. ANALISIS HORIZONTAL

1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca

Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap, jika selisih harus dijelaskan di CaLK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL TANAH	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00
- ASET TANAH 2022	:	0,00
- ASET TANAH 2021	:	0,00
Selisih	:	0,00

Mutasi Bertambah

Mutasi Berkurang

TOTAL	:	0,00
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap, jika selisih harus dijelaskan di CaLK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	95.197.185,00
- ASET PERALATAN DAN MESIN 2022	:	1.090.938.354,00
- ASET PERALATAN DAN MESIN 2021	:	995.741.169,00
Selisih	:	95.197.185,00

Mutasi Bertambah	
Mutasi Antar SKPD : Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027 /201 / UMUM /2022 tanggal 09 Juni 2022	2.273.387,00
Mutasi Antar SKPD : Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027 /378 / UMUM /2022 tanggal 30 Agustus 2022	78.191.982,00
Mutasi Antar SKPD : Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027 /583 / UMUM /2022 tanggal 30 Nopember 2022	1.303.195,00
Mutasi Antar SKPD : Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027 /526 / UMUM /2022 tanggal 07 Nopember 2022	13.428.621,00
Mutasi Berkurang	
TOTAL	95.197.185,00
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS	
REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	0,00
- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2022	0,00
- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2021	0,00
Selisih	0,00
Mutasi Bertambah	
Mutasi Berkurang	
TOTAL	0,00
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS	
REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	0,00
- ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2022	0,00
- ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2021	0,00
Selisih	0,00
Mutasi Bertambah	
Mutasi Berkurang	
TOTAL	0,00

Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap, jika selisih harus dijelaskan di CaLK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL Kontruksi Dalam Pengerjaan	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00
- ASET Kontruksi Dalam Pengerjaan 2022	:	0,00
- ASET Kontruksi Dalam Pengerjaan 2021	:	0,00
Selisih	:	0,00
Mutasi Bertambah		
Mutasi Berkurang		
TOTAL	:	0,00
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap lainnya, jika selisih harus dijelaskan di CaLK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00
- ASET TETAP LAINNYA 2022	:	0,00
- ASET TETAP LAINNYA 2021	:	0,00
Selisih	:	0,00
Mutasi Bertambah		
Mutasi Berkurang		
TOTAL	:	0,00
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset lainnya, jika selisih harus dijelaskan di CaLK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL ASET LAINNYA	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00
- ASET LAINNYA 2022	:	8.020.996,00
- ASET LAINNYA 2021	:	8.020.996,00
Selisih	:	0,00
Mutasi Bertambah		
Mutasi Berkurang		
TOTAL	:	0,00
2) Analisis horizontal antara LO,Laporan Perubahan Equitas dan Neraca		

Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya	Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya
RUMUS	
EKUITAS AWAL(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	: (8.415.022.291,21)
EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA (NERACA)	: (8.415.022.291,21)
Selisih	: 0,00
Surplus/Defisit pada Laporan Operasional harus sama dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas	Surplus/Defisit pada Laporan Operasional = Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas
RUMUS	
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN OPERASIONAL)	: (2.018.309.708,32)
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	: (2.018.309.708,32)
Selisih	: 0,00
Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas pada Neraca	Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas pada Neraca
RUMUS	
EKUITAS AKHIR(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	: (10.338.134.814,53)
EKUITAS (NERACA)	: (10.338.134.814,53)
Selisih	: 0,00
3) Analisis horizontal antara LO,LRA dan Neraca	
Pendapatan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan Pajak (LRA) dikurangi Piutang Pajak Awal Tahun ditambah Piutang Pajak Akhir Tahun	Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Piutang Pajak Awal Tahun + Piutang Pajak Akhir Tahun
RUMUS	
PENDAPATAN PAJAK (LO)	: 0,00
PENDAPATAN PAJAK (LRA)	: 0,00
PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA)	: 0,00
PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA)	: 0,00
Selisih	: 0,00
Pendapatan Retribusi (LO) harus sama dengan Pendapatan Retribusi (LRA) dikurangi Piutang Retribusi Awal Tahun ditambah Piutang Retribusi Akhir Tahun	Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) - Piutang Retribusi Awal Tahun + Piutang Retribusi Akhir Tahun
RUMUS	
PENDAPATAN RETRIBUSI (LO)	: 0,00
PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA)	: 0,00
PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA)	: 0,00
PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA)	: 0,00
Selisih	: 0,00

Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun		Beban Persediaan(LO)=Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA)+Persediaan Awal Tahun-Persediaan Akhir Tahun.Perhatikan cara penilaian persediaan: FIFO atau <i>weighted average</i>
RUMUS		
BEBAN PERSEDIAAN (LO)	:	376.086.587,00
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA)	:	376.086.587,00
PERSEDIAAN AWAL TAHUN	:	0,00
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN	:	0,00
Selisih	:	0,00
TOTAL	:	(0,00)
Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Awal Tahun		Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Awal Tahun
RUMUS		
BEBAN (LO)	:	67.213.144,00
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN AKHIR TAHUN	:	(988.842.377,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN AWAL TAHUN	:	(921.629.233,00)
Selisih	:	(67.213.144,00)
Koreksi Bertambah		
Koreksi Berkurang		
Penyusutan		
Penyusutan tahun 2022		(67.213.144,00)
TOTAL	:	(67.213.144,00)
Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Awal Tahun		Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Awal Tahun
RUMUS		
BEBAN (LO)	:	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN AKHIR TAHUN	:	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN AWAL TAHUN	:	0,00
Selisih	:	0,00
Koreksi Bertambah		
Koreksi Berkurang		
Penyusutan		
Penyusutan tahun 2022		0,00
TOTAL	:	0,00

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Awal Tahun	Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Awal Tahun
RUMUS	
BEBAN (LO)	: 0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN AKHIR TAHUN	: 0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN AWAL TAHUN	: 0,00
Selisih	: 0,00
Koreksi Bertambah	
Koreksi Berkurang	
Penyusutan	
Penyusutan tahun 2022	0,00
TOTAL	: 0,00
Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Awal Tahun	Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Awal Tahun
RUMUS	
BEBAN (LO)	: 0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA AKHIR TAHUN	: 0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA AWAL TAHUN	: 0,00
Selisih	: 0,00
Koreksi Bertambah	
Koreksi Berkurang	
Penyusutan	
Penyusutan tahun 2022	0,00
TOTAL	: 0,00
Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Amortisasi Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Amortisasi Awal Tahun	Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Amortisasi Akhir Tahun - Akumulasi Amortisasi Awal Tahun
RUMUS	
AKUMULASI AMORTISASI AKHIR TAHUN	: 0,00
AKUMULASI AMORTISASI AWAL TAHUN	: 0,00
Selisih	: 0,00
Koreksi Bertambah	
Koreksi Berkurang	
Penyusutan	
Penyusutan tahun 2022	0,00
TOTAL	: 0,00

**PENJELASAN ATAS PENYAJIAN DATA REALISASI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN
2022
YANG DICATAT SEBAGAI REALISASI PADA NERACA TAHUN 2022**

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEREKONOMIAN

NO	URAIAN	REALISASI 2022		SELISIH	KETERANGAN	
		BELANJA MODAL	NERACA		Nilai	Penjelasan
1	Tanah	0,00	0,00	0,00		
2	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00		
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00		
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00		
6	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.2. Laporan Operasional

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Realisasi - LO 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%	Realisasi - LRA 2022 (Rp)
-------------	---------------	---	---	--	----------	--

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.2. Laporan Operasional

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Realisasi - LO 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%	Realisasi - LRA 2022 (Rp)
8	BEBAN DAERAH	2.018.309.708,32	1.191.540.905,59	826.768.802,73	169,39	0,00
	8.1 BEBAN OPERASI	2.018.309.708,32	1.191.540.905,59	826.768.802,73	169,39	0,00
8.1	BEBAN OPERASI	2.018.309.708,32	1.191.540.905,59	826.768.802,73	169,39	1.950.796.330,00
	8.1.02 Beban Barang dan Jasa	1.951.096.564,32	1.135.308.247,59	815.788.316,73	171,86	1.950.796.330,00
	8.1.08 Beban Penyusutan dan Amortisasi	67.213.144,00	56.232.658,00	10.980.486,00	119,53	0,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.951.096.564,32	1.135.308.247,59	815.788.316,73	171,86	1.950.796.330,00
	<p>Beban Barang dan Jasa pada BIRO PEREKONOMIAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.951.096.564,32 dan realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.135.308.247,59 terjadi kenaikan sebesar Rp. 815.788.316,73 atau 171,86%. Jika Beban Barang dan Jasa pada BIRO PEREKONOMIAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.951.096.564,32 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa - LRA sebesar Rp. 1.950.796.330,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. 300.234,32, dapat dijelaskan sebagai berikut :</p>					
	1 Beban Barang	376.086.587,00	146.221.781,00	229.864.806,00	38,88	376.086.587,00
	2 Beban Jasa	1.035.184.130,32	843.018.459,59	192.165.670,73	81,44	1.034.883.896,00
	3 Beban Pemeliharaan	70.116.900,00	47.541.500,00	22.575.400,00	67,80	70.116.900,00
	4 Beban Perjalanan Dinas	469.708.947,00	98.526.507,00	371.182.440,00	20,98	469.708.947,00
1	Beban Barang	376.086.587,00	146.221.781,00	229.864.806,00	38,88	376.086.587,00

Jika Beban Barang pada BIRO PEREKONOMIAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.376.086.587,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Barang - LRA sebesar Rp. 376.086.587,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.034.883.896,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. 300.234,32, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Jasa - LRA 2022	1.034.883.896,00
a. Beban Jasa dibayar dimuka Tahun Anggaran 2021	1.357.847,79
b. Beban Jasa dibayar dimuka Tahun Anggaran 2022	-1.057.613,47
c. Utang Barang dan Jasa 2021	0,00
d. Utang Barang dan Jasa 2022	0,00
e. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00
f. Belanja Barang dan Jasa sebagai penambah kapitalisasi aset	0,00
g. Persediaan BLUD Tahun 2021	0,00
h. Persediaan BLUD Tahun 2022	0,00
i. Beban Jasa BTT	0,00

**- Beban Jasa - LO
2022** **1.035.184.130,32**

**3 Beban
Pemeliharaan** **70.116.900,00** **47.541.500,00** **22.575.400,00** **67,80** **70.116.900,00**

Jika Beban Pemeliharaan pada BIRO PEREKONOMIAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.70.116.900,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan - LRA sebesar Rp. 70.116.900,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Pemeliharaan - LRA 2022	70.116.900,00
a. Utang Pemeliharaan	0,00

Tahun Anggaran
2022

- b. Utang Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 0,00
- c. Belanja Modal yang tidak masuk sebagai kapitalisasi aset 0,00
- d. Belanja Pemeliharaan yang menjadi aset 0,00
- e. Pemeliharaan BTT 0,00

- Beban Pemeliharaan - LO 2022 70.116.900,00

4 Beban Perjalanan Dinas 469.708.947,00 98.526.507,00 371.182.440,00 20,98 469.708.947,00

Beban Perjalanan Dinas pada BIRO PEREKONOMIAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.469.708.947,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas - LRA sebesar Rp. 469.708.947,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai beriku :

- Beban Perjalanan Dinas - LRA 2022 469.708.947,00

- a. Belanja Perjalanan dinas sebagai penambah kapitalisasi aset 0,00
- b. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap 0,00
- c. Perjalanan Dinas BTT 0,00

- Beban Perjalanan Dinas - LO 2022 469.708.947,00



- Beban Barang - LRA 2022	376.086.587,00
a. Persediaan Tahun Anggaran 2022	0,00
b. Persediaan Tahun Anggaran 2021	0,00
c. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00
d. Belanja Persediaan yag menjadi Aset	0,00
e. Utang Persediaan 2022	0,00
f. Utang Persediaan 2021	0,00
g. Hibah dari Pihak Ketiga/Lainya	0,00
h. Persediaan dari BTT	0,00
i. Extracomptable	0,00
j. Belanja Persediaan Menjadi Extracomptable	0,00
k. Beban Barang BTT	0,00
l. Koreksi Persediaan	0,00
- Beban Barang - LO 2022	376.086.587,00

2 Beban Jasa 1.035.184.130,32 843.018.459,59 192.165.670,73 81,44 1.034.883.896,00

Jika Beban Jasa pada BIRO PEREKONOMIAN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.035.184.130,32 dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa - LRA sebesar Rp.

3.6 Koreksi	
3.7 Rusak Berat	
3.8 Beban	
3.9 Mutasi Nomenklatur	
5 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022	0,00

1.3.07 Akumulasi Penyusutan (988.842.377,00) (921.629.233,00)

Akumulasi Penyusutan adalah Penyajian kembali nilai buku aset tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan, rincian penjelasan sebagai berikut :

1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(988.842.377,00)	(921.629.233,00)
- Per 31 Desember 2021	(921.629.233,00)	
- Koreksi	0,00	
a. Koreksi Bertambah	0,00	
1) Hibah Masuk	0,00	
2) Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
b. Koreksi Berkurang	0,00	
1) Hibah Keluar	0,00	
2) Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
5) Penghapusan	0,00	
6) Rusak Berat	0,00	
- Setelah Koreksi	(921.629.233,00)	
- Penyusutan tahun 2022	(67.213.144,00)	
- Per 31 Desember 2022	(988.842.377,00)	
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Per 31 Desember 2021	0,00	
- Koreksi	0,00	
a. Koreksi Bertambah	0,00	
1) Hibah Masuk	0,00	

1) Hibah Masuk	0,00
2) Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00
3) Reklas Antar Akun	0,00
4) Koreksi	0,00
b. Koreksi Berkurang	0,00
1) Hibah Keluar	0,00
2) Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00
3) Reklas Antar Akun	0,00
4) Koreksi	0,00
5) Penghapusan	0,00
6) Rusak Berat	0,00
- Setelah Koreksi	0,00
- Penyusutan tahun 2022	0,00
- Per 31 Desember 2022	0,00

1.4.4	Aset Lain-lain	8.020.996,00	8.020.996,00
1	Aset Lain Lain Per 31 Desember 2021	8.020.996,00	
2	Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Hibah		
	2.3 Beban		
	2.4 Mutasi Antar SKPD		
	2.5 Reklas		
	2.6 Revaluasi		
	2.7 Koreksi		
	2.8 Mutasi Nomenklatur		
3	Mutasi Berkurang	0,00	
	3.1 Hibah		
	3.2 Penghapusan		
	3.3 Mutasi Antar SKPD		
	3.4 Reklas		
	3.5 Revaluasi		
	3.6 Koreksi		

	3.7 Rusak Berat		
	3.8 Beban		
	3.9 Mutasi Nomenklatur		
	5 Aset Lain Lain Per 31 Desember 2022	8.020.996,00	
2	KEWAJIBAN	0,00	0,00
	2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
	2.1.1 Utang PPh Pusat	0,00	0,00
	2.1.2 Utang PPN Pusat	0,00	0,00
	2.1.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
	2.1.1.1 PPH21	0,00	
	2.1.1.2 PPH22	0,00	
	2.1.1.3 PPH23	0,00	
	2.1.1.4 PPH4	0,00	
	2.1.2 Utang PPN Pusat	0,00	0,00
	2.1.2.1 PPN	0,00	
	2.1.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
	2.2 Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
	2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0,00	0,00
	2.3 Utang Belanja	0,00	0,00
	2.3.1 Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
	2.3.1.1 Gaji dan Tunjangan	0,00	
	2.3.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	0,00	
	2.3.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	
	2.3.1.4 Biaya Pemungutan Pendapatan Daerah	0,00	
	2.3.1.5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	

2.3.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	
2.3.1.7 Honorarium PNSD	0,00	
2.3.1.8 Honorarium Non PNSD	0,00	
2.3.1.9 Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	
2.3.1.10 Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	
2.3.1.11 Belanja Pegawai BLUD	0,00	
2.3.2 Utang Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
2.3.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.3.2.2 Belanja Bahan/Material	0,00	
2.3.2.3 Belanja Jasa Kantor	0,00	
2.3.2.4 Belanja Premi Asuransi	0,00	
2.3.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	
2.3.2.6 Belanja Cetak Dan Pengadaan	0,00	
2.3.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	0,00	
2.3.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
2.3.2.9 Belanja Sewa Alat Berat	0,00	
2.3.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	0,00	
2.3.2.11 Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
2.3.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	
2.3.2.13 Belanja Pakaian Kerja	0,00	
2.3.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
2.3.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
2.3.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	
2.3.2.17 Belanja kursus, latihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00	
2.3.2.18 Belanja Pemeliharaan	0,00	
2.3.2.19 Belanja Jasa Konsultasi	0,00	
2.3.2.20 Belanja Barang Dana BOS	0,00	

2.3.2.21 Belanja Hibah Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat /Pihak Ketiga/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah	0,00	
2.3.2.22 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	0,00	
2.3.2.23 Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	
2.3.2.24 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0,00	
2.3.2.25 Belanja Barang dan Jada BLUD	0,00	
2.3.2.26 Belanja Bantuan Sosial Barang	0,00	
2.3.3 Utang Belanja Modal	0,00	0,00
2.3.3.1 Belanja Tanah	0,00	
2.3.3.2 Belanja Peralatan Dan Mesin	0,00	
2.3.3.3 Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	
2.3.3.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	
2.3.3.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	
2.3.3.6 Belanja Aset Lainnya	0,00	
Jumlah Kewajiban	0,00	0,00
3 EKITAS	111.174.586,47	83.490.779,79
Pada Neraca per 31 Desember 2022 Ekuitas sebesar 111.174.586,47 sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2021 saldo Ekuitas sebesar 83.490.779,79		
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKITAS DANA	111.174.586,47	83.490.779,79

2) Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
b. Koreksi Berkurang	0,00	
1) Hibah Keluar	0,00	
2) Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
5) Penghapusan	0,00	
6) Rusak Berat	0,00	
- Setelah Koreksi	0,00	
- Penyusutan tahun 2022	0,00	
- Per 31 Desember 2022	0,00	
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
- Per 31 Desember 2021	0,00	
- Koreksi	0,00	
a. Koreksi Bertambah	0,00	
1) Hibah Masuk	0,00	
2) Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
b. Koreksi Berkurang	0,00	
1) Hibah Keluar	0,00	
2) Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
5) Penghapusan	0,00	
6) Rusak Berat	0,00	
- Setelah Koreksi	0,00	
- Penyusutan tahun 2022	0,00	
- Per 31 Desember 2022	0,00	
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
- Per 31 Desember 2021	0,00	

1 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021	995.741.169,00
2 Mutasi Bertambah	95.197.185,00
2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00
2.2 Hibah	
2.3 Beban	
2.4 Mutasi Antar SKPD	
Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027 /201 / UMUM /2022 tanggal 09 Juni 2022	2.273.387,00
Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027 /378 / UMUM /2022 tanggal 30 Agustus 2022	78.191.982,00
Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027 /583 / UMUM /2022 tanggal 30 Nopember 2022	1.303.195,00
Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027 /526 / UMUM /2022 tanggal 07 Nopember 2022	13.428.621,00
2.5 Reklas	
2.6 Revaluasi	
2.7 Koreksi	
2.8 Pengadaan dari Belanja Tidak Terduga	
2.9 Mutasi Nomenklatur	
3 Mutasi Berkurang	0,00
3.1 Hibah	
3.2 Penghapusan	
3.3 Mutasi Antar SKPD	
3.4 Reklas	
3.5 Revaluasi	

- Koreksi	0,00
a. Koreksi Bertambah	0,00
1) Hibah Masuk	0,00
2) Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00
3) Reklas Antar Akun	0,00
4) Koreksi	0,00
b. Koreksi Berkurang	0,00
1) Hibah Keluar	0,00
2) Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00
3) Reklas Antar Akun	0,00
4) Koreksi	0,00
5) Penghapusan	0,00
6) Rusak Berat	0,00
- Setelah Koreksi	0,00
- Penyusutan tahun 2022	0,00
- Per 31 Desember 2022	0,00

1.4 ASET LAINNYA 8.020.996,00 8.020.996,00

Rincian dan perbandingan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari :

1.4.4 Aset Lain-lain	8.020.996,00	8.020.996,00
Jumlah Aset Lainnya	<u>8.020.996,00</u>	<u>8.020.996,00</u>

1.4.1 Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00

Tagihan Jangka Panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah

1 Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna

1 Sewa	0,00	0,00
2 Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00

3	Bangun Guna Serah	0,00	0,00
4	Bangun Serah Guna	0,00	0,00
1.4.3	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
-	Aset Tidak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2021	0,00	
-.	Mutasi Bertambah	0,00	
	1.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	1.2 Hibah		
	1.3 Beban		
	1.4 Mutasi Antar SKPD		
	1.5 Reklas		
	1.6 Revaluasi		
	1.7 Koreksi		
	1.71 Mutasi Nomenklatur		
-.	Mutasi Berkurang	0,00	
	1.8 Hibah		
	1.9 Penghapusan		
	1.11 Mutasi Antar SKPD		
	1.12 Reklas		
	1.13 Revaluasi		
	1.14 Koreksi		
	1.15 Rusak Berat		
	1.16 Beban		
	1.18 Mutasi Nomenklatur		
-	Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2022	0,00	
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
-	Per 31 Desember 2021	0,00	
-	Koreksi	0,00	
	a. Koreksi Bertambah	0,00	

kenaikan sebesar Rp. 0,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------